



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan *Preferential Trade Agreement (PTA)* antara Indonesia dan Maroko

Skripsi

Oleh

Kevin Surya Luthfiansyah

2017330070

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan *Preferential Trade Agreement (PTA)* antara Indonesia dan Maroko

Skripsi

Oleh

Kevin Surya Luthfiansyah

2017330070

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Kevin Surya Luthfiansyah
Nomor Pokok : 2017330070
Judul : Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan Maroko

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 25 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A. :

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. :

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., MA. :

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Surya Luthfiansyah
NPM : 2017330070
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan
Preferential Trade Agreement (PTA) antara
Indonesia dan Maroko.

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Januari 2021



Kevin Surya Luthfiansyah

ABSTRAK

Nama : Kevin Surya Luthfiansyah
NPM : 2017330070
Judul Skripsi : Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan Maroko

Penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terbentuknya PTA antara Indonesia dan Maroko. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini, utamanya adalah berupa motivasi negara dalam menjalin hubungan perdagangan bilateral melalui PTA. Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi masalah pada rentang waktu mulai tahun 2014 sebagai tahun perbandingan data makro ekonomi kedua negara terutama terkait dengan kinerja perdagangan tahunan, hingga pada tahun 2018 sehubungan dengan dimulainya negosiasi PTA antara Indonesia dan Maroko yang masih berjalan selagi dilakukannya penelitian ini. Aktor yang akan menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah aktor negara, yaitu Indonesia dan Maroko. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep integrasi ekonomi. Penulis juga akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplanatif yang mengindikasikan bahwa penelitian ditujukan untuk memberikan penjelasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi pembentukan PTA antara Indonesia dan Maroko. Faktor pertama, yaitu posisi Maroko sebagai pusat perdagangan dan akses pasar menuju kawasan Afrika Sub-Sahara dan Uni Eropa. Faktor kedua, yaitu strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Faktor ketiga, yaitu kesamaan ukuran ekonomi sebagai faktor pendukung pembentukan PTA dan peningkatan ekspor komoditas unggulan antara Indonesia dan Maroko. Ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan pola impor serta mengunci kemungkinan diterapkannya proteksi.

Kata Kunci; Perjanjian Perdagangan Preferensial, Integrasi Ekonomi, Motivasi

ABSTRACT

Name : Kevin Surya Luthfiansyah
NPM : 2017330070
Thesis Title : Factors behind the Establishment of a Preferential Trade Agreement (PTA) between Indonesia and Morocco

This study aims to explain the factors behind the formation of PTA between Indonesia and Morocco. The factors referred to in this research are mainly the motivation of states in establishing bilateral trade relations through PTA. The author limits the problem to the time frame starting in 2014 as a year of comparison of the two countries' macroeconomic data, especially related to annual trade performance, until 2018 in connection with the start of PTA negotiations between Indonesia and Morocco that were still ongoing while this study was being carried out. Actors that will be the focus of attention in this research are state actors, namely Indonesia and Morocco. In conducting this research, the author uses economic integration concept. The author will also use an explanative qualitative approach, which indicates that the research is intended to explain. The results of this study indicate that there are three factors behind the formation of PTA between Indonesia and Morocco. The first factor is Morocco's position as a trade centre and market access to Sub-Saharan Africa and the European Union. The second factor is namely Indonesia's export market diversification strategy. The third factor is the similarity in economic size as a supporting factor for the formation of PTA and the increase in exports of superior commodities between Indonesia and Morocco. These three factors can increase the pattern of imports and lock in the possibility of implementing protection.

Keywords; Preferential Trade Agreement, Economic Integration, Motivation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan YME atas berkah dan rezeki-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan mengenai faktor – faktor yang melatarbelakangi pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan Maroko.

Maroko merupakan pasar ekspor non-tradisional Indonesia, begitu pula Indonesia yang masih menjadi pasar ekspor non-tradisional Maroko. Oleh karenanya, Indonesia dan Maroko kemudian berupaya untuk memperluas pasar ekspor, dengan membentuk kerja sama perdagangan melalui PTA. PTA merupakan salah satu bentuk awal dari integrasi ekonomi, yang mana menjadi salah satu kajian ekonomi internasional, dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai PTA sebagai salah satu bentuk kerja sama perdagangan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kondisi perekonomian dan kinerja perdagangan antara Indonesia dan Maroko, serta diakhiri dengan memaparkan temuan – temuan dan analisis teoritis.

Maka dari itu, penulis berharap hasil penelitian ini, dapat menjadi acuan bagi penelitian – penelitian berikutnya yang memiliki fokus bidang terkait, utamanya dalam menganalisis faktor – faktor dilakukannya integrasi ekonomi melalui PTA.

Bandung, 07 Januari 2021



Penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Atom selaku dosen pembimbing, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini selama satu semester, sehingga skripsi ini ditulis dengan sistematis. Terima kasih juga kepada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah memberikan data dan jawaban wawancara, sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama, yang sudah banyak sekali berkorban waktu, pikiran, dan tenaganya, tanpa pamrih mengiringi kehidupan penulis dan menghadapi tantangan serta berbagai kendala. Untuk kedua kakakku, A Rangga dan A Jodhy, serta keluargaku yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama penulis menempuh pendidikan kuliah ini. Untuk SMA BPI 1 Bandung, khususnya Ibu Deti dan Ibu Siti, terima kasih atas segala bantuannya sehingga penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Tanpa mereka penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi dan studi yang ditempuh.

Untuk Mario, Zirras, Irvin, Iki, Dipo, Calvin, Grace, Yogaz, Michelle, Yuda, Dana, Fauzan, Keyzhal, Jambrong, Delpedro, Raka, Bravi, Faishal dan Pengmas HMPSIHI, Delegasi Prakdip Indonesia maju dan kawan – kawan lainnya selalu memberikan dukungan dan senyuman serta keseruan yang mengiringi kehidupan penulis semasa SMA dan Kuliah, dan hingga saat ini. Terima kasih Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR FIGUR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix

BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Pustaka.....	11
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.3. Sumber Data	24
1.7 Sistematika Pembahasan	25
1.8. Linimasa	27

BAB II *Preferential Trade Agreement* sebagai Salah Satu Bentuk Kerja Sama Perdagangan Internasional..... 28

2.1 Perkembangan PTA dalam Sistem Perdagangan Internasional.....	30
2.1.1 PTA pada Masa Imperial.....	30

2.1.2	PTA pada Abad ke-19 dan Perang Dunia I	31
2.1.3	Periode di antara kedua Perang Dunia.....	32
2.1.4	Berakhirnya Perang Dunia II dan Lahirnya GATT	33
2.1.5	PTA pada Periode 1990-an	35
2.2	Proliferasi dan Kedalaman PTA Dewasa Ini.....	35
2.3	Meningkatnya Popularitas PTA	39
2.4	<i>Rules of Origin</i> (ROO) dalam PTA.....	42

BAB III Kondisi Perekonomian Domestik dan Kinerja Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Maroko..... 45

3.1	Perekonomian Indonesia	46
3.2	Kebijakan Perdagangan dan Orientasi Ekspor Indonesia.....	52
3.3	Perekonomian Maroko	59
3.4	Kebijakan Perdagangan dan Orientasi Ekspor Maroko.....	66
3.5	Kinerja Perdagangan Indonesia – Maroko dari tahun 2014 hingga 2018	71
3.5.1	Kinerja Perdagangan Indonesia – Maroko (2014).....	72
3.5.2	Kinerja Perdagangan Indonesia – Maroko (2015).....	73
3.5.3	Kinerja Perdagangan Indonesia – Maroko (2016).....	74
3.5.4	Kinerja Perdagangan Indonesia – Maroko (2017).....	74
3.5.5	Kinerja Perdagangan Indonesia – Maroko (2018).....	75

BAB IV Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan PTA antara Indonesia dan Maroko..... 77

4.1	Faktor Pertama: Posisi Maroko sebagai Pusat Perdagangan dan Akses Pasar di Kawasan Afrika Sub-Sahara	78
4.2	Faktor Kedua: Strategi Diversifikasi Pasar Ekspor Indonesia.....	82
4.3	Faktor Ketiga: Kesamaan Ukuran Ekonomi sebagai Faktor Pendukung Pembentukan PTA dan Peningkatan Ekspor Komoditas Unggulan antara Indonesia dan Maroko.	87
4.4	Analisis Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan PTA antara Indonesia dan Maroko.....	89

BAB V Kesimpulan..... 94

DAFTAR PUSTAKA..... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Linimasa Penelitian Skripsi	27
Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDB Indonesia	51
Tabel 3.2 Tingkat Tarif Indonesia	57
Tabel 3.3 Mitra Dagang Terbesar Indonesia (2018).....	58
Tabel 3.4 Efek Ekonomi akibat Arab Spring, 2010 – 2013.....	60
Tabel 3.5 Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDB Maroko	65
Tabel 3.6 Mitra Dagang Terbesar Maroko (2018).....	71

DAFTAR FIGUR

Figur 2. 1. Perkembangan Jumlah PTA dalam Perdagangan Internasional.....	37
Figur 2.2 Kedalaman PTA dalam Perdagangan Internasional	38
Figur 3.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.....	47
Figur 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	48
Figur 3.3 Produk Domestik Bruto (PDB) Maroko	62
Figur 3.4 Kinerja Perdagangan antara Indonesia dan Maroko (2014-2018).....	72
Figur 4.1 Indeks Konektivitas Pengiriman Maroko, 2008 - 2018.....	81

DAFTAR SINGKATAN

AfCTA	<i>African Continental Free Trade Area</i>
AMU	<i>Arab Maghreb Union</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast-Asian Nations</i>
BPPP	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
BTA	<i>Bilateral Trade Agreement</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEIC	<i>Census and Economic Information Center</i>
CMS	<i>Constant Market Share</i>
EAC	<i>East African Community</i>
ECOWAS	<i>Economic Community of West African States</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement/Area</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GSP	<i>Generalized System of Preferences</i>
GSTP	<i>Global System of Trade Preferences</i>
IAF	<i>Indonesia – Africa Forum</i>
IIT	<i>Intra-Industry Trade</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
ISI	<i>Import Substitution Industrialization</i>

ITO	<i>International Trade Organization</i>
JTC	<i>Joint Trade Committee</i>
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemendag	Kementerian Perdagangan
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
LSCI	<i>Liner Shipping Connectivity Index</i>
MENA	<i>Middle-East and North Africa</i>
MFN	<i>Most-Favoured Nation</i>
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NAFTA	<i>North American Free Trade Agreement</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PTA	<i>Preferential Trade Agreement</i>
ROO	<i>Rules of Origin</i>
SACU	<i>Southern African Custom Union</i>
SKB	Sidang Komisi Bersama
TOT	<i>Terms of Trade</i>
TPS	<i>Trade Preferences System</i>
USD	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-undang

WITS	<i>World Integrated Trade Solution</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
YOY	<i>Year-Over-Year</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh manusia, demi mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Setiap individu memiliki kebutuhan pribadi yang berbeda-beda, yang tidak seluruhnya dapat diperoleh sendiri. Namun, masing-masing individu memiliki keahlian serta sumber daya yang bermacam-macam dan dapat saling melengkapi satu sama lain. Oleh karenanya, pertukaran barang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh setiap individu, untuk melengkapi kebutuhan dirinya dan orang lain. Layaknya individu, negara pun memiliki kebutuhan dan sumber daya yang berbeda-beda pula. Perdagangan dilakukan oleh negara, guna memastikan tersedianya kebutuhan-kebutuhan pokok warganya untuk bertahan hidup. Namun, berbeda dengan individu, negara tidak dapat melakukan hubungan perdagangan begitu saja, diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tertentu sehingga negara tidak mendapatkan kerugian dari kegiatan perdagangannya, seperti berlebihan cadangan barang atau justru mendapat lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan setiap warga negaranya. Selain itu, negara juga perlu mempertimbangkan apakah dari kegiatan perdagangan yang dilakukan, dapat berdampak terhadap keseluruhan ekonomi domestiknya. Oleh karenanya, beberapa negara dapat pula menutup atau membatasi diri terhadap integrasi ekonomi dengan negara lain.

Pembatasan diri negara untuk melakukan liberalisasi perdagangannya, dapat menjadi hambatan dagang bagi negara lain, yang membutuhkan tersedianya sumber daya komplementer. Hambatan perdagangan (*barriers to trade*), dapat menghalangi masuknya barang dan jasa baik dengan mengenakan hambatan tarif maupun non-tarif. Oleh karenanya, tidak jarang suatu negara dapat mengadopsi posisi kebijakan tertentu yang berbeda-beda dengan rekan dagangnya. Sebagai contoh, suatu negara secara keseluruhan cenderung menginginkan adanya pengurangan hambatan dagang, namun di saat yang sama pula dapat menempatkan embargo perdagangan terhadap satu atau lebih negara dengan dalih tujuan sosial atau hegemoni.¹

Dalam menciptakan hubungan perdagangan, negara diharuskan untuk mengurangi batasan-batasan pergerakan barang dan jasa, guna memperkuat integrasi ekonomi yang akan dijalin. Namun, negara menyadari bahwa dengan pengurangan batasan-batasan tersebut maka kendali negara atas kondisi ekonomi domestiknya akan semakin menyusut pula, oleh karenanya penciptaan hubungan perdagangan sering kali dilakukan secara bertahap. Skema integrasi ekonomi yang paling umum adalah *Bilateral Trade Agreement* (BTA), yang biasanya hanya melibatkan dua negara saja. Namun, BTA dapat pula dilakukan antara negara dengan blok perdagangan regional, atau antar blok perdagangan regional. Dengan adanya blok perdagangan regional, dapat menghasilkan terjadinya kebebasan berdagang antar anggota dengan pembentukan pengaturan-pengaturan

¹ Dennis R. Appleyard dan Alfred J. Field, Jr., *International Economics*, 8th ed. (New York, NY: McGraw-Hill/Irwin, 2014), hlm. 336

penghapusan tarif, selagi menjaga hambatan-hambatan perdagangan dengan negara non-anggota. Pula, blok perdagangan regional tidak terikat terhadap batasan-batasan geografis tertentu.²

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko telah berlangsung sejak enam dekade yang lalu, yang diawali dengan pemberian surat-surat kepercayaan dari pemerintah Indonesia kepada Raja Mohammed V tanggal 19 April 1960 dan dilanjutkan dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) kunjungan Presiden Soekarno ke kota Rabat, Maroko pada tanggal 2 Mei 1960. Namun, persahabatan Indonesia dan Maroko tidak serta merta diiringi oleh hubungan yang baik dan stabil secara terus menerus. 7 tahun setelah dibukanya KBRI Rabat, akibat dari buruknya situasi politik Indonesia serta pertimbangan penghematan anggaran negara, tahun 1967 KBRI Rabat ditutup dan dirangkap secara berturut-turut oleh KBRI Kairo tahun 1967, KBRI Alger tahun 1970, kemudian KBRI Tunis tahun 1976 hingga KBRI Paris pada tahun 1983. Seiring dengan pulihnya kondisi politik domestik serta moneter Indonesia, pula dengan orientasi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Afrika serta Timur Tengah, turut memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dan Maroko. KBRI Rabat dibuka kembali dengan tingkat Kuasa Usaha Tetap pada tanggal 22 Maret 1985, yang disusul dengan pembukaan dibukanya Kedutaan Besar Pemerintah Maroko pada

² David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, 2nd ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001), hlm. 124.

bulan Juni 1986 serta peningkatan status Perwakilan RI di Rabat menjadi Kedutaan Besar pada tahun 1988.³

Upaya pemerintah kedua negara untuk saling menjalin hubungan bilateral yang intensif berlanjut pada tahun 2008 dengan penyelenggaraan pertemuan pertama Sidang Komisi Bersama (SKB) serta penandatanganan nota kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MOU) perihal kerja sama di bidang politik, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara, yang secara spesifik menghasilkan lima bahasan nota kesepahaman⁴, yakni:

1. *Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation,*
2. *Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,*
3. *MOU on Bilateral Consultations,*
4. *MOU on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation,* dan
5. *Agreed Minutes of the 1st Meeting of Joint Bilateral Commission between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Morocco.*

Proses lanjutan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Maroko, mengalami penundaan selama satu dekade lamanya hingga pada tahun 2018 SKB diselenggarakan kembali untuk menentukan rencana aksi dan implementasi, serta pengawasan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman

³ Embassy of the Republic of Indonesia in Rabat, "Keterangan Singkat Kerajaan Maroko dan Kerja Sama Bilateral dengan Indonesia", November 30, 2014. <https://kemlu.go.id/rabat/en/read/morocco/2767/etc-menu> diakses pada 22 Februari 2020.

⁴ Ibid.

tersebut. Pembangunan hubungan yang positif dan intensif antara Indonesia dan Maroko, menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi integrasi yang kuat, baik secara politik, sosial-budaya, maupun ekonomi.⁵

Pada tahun 2018 pula, Indonesia menginisiasi pembentukan *Indonesia – Africa Forum* (IAF) guna melakukan ekspansi hubungan ekonomi dengan negara-negara di benua Afrika, sebagai bagian dari orientasi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Inisiatif tersebut menjadi kesempatan yang perlu diambil, terutama untuk terus meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Afrika serta membuka peluang kerja sama perdagangan komoditas-komoditas alternatif, hingga kemungkinan pembentukan blok perdagangan baru. Selain itu, forum tersebut menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam membangun dan memperkuat, serta meningkatkan hubungan perdagangan, terutama terhadap negara-negara tujuan ekspor non-tradisional di Afrika, salah satunya adalah Maroko.

Maroko merupakan salah satu negara Afrika tujuan ekspor Indonesia, dengan potensi ekonomi yang perlu dimaksimalkan. Sebagai gambaran, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Maroko mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar USD 3.349, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni USD 2.995 pada tahun 2016, serta USD 3.147 pada tahun 2017.⁶ Sejalan dengan PDB per kapita Indonesia yang mengalami tren peningkatan pada tahun 2018 sebesar

⁵ Retno M, "Tandatangan 5 MoU, Indonesia – Maroko Sepakati Wujudkan ke dalam Rencana Aksi", RRI, Oktober 26, 2018. http://rri.co.id/post/berita/589919/nasional/tandatangan_5_mou_indonesia_maroko_sepakati_wujudkan_kedalam_rencana_aksi.html diakses pada 22 Februari 2020

⁶ "Morocco GDP per Capita", CEIC, diakses pada Februari 22, 2020, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/morocco/gdp-per-capita>

USD 3.945, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar USD 3.604 dan USD 3.885 pada tahun 2017.⁷ Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia terhadap Maroko tercatat mengalami surplus sebesar USD 34 juta pada tahun 2016, dengan nilai ekspor sebesar USD 96 juta dibandingkan nilai impor sebesar USD 62 juta. Kemudian, pada tahun 2017 surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Maroko tercatat sebesar USD 17 juta, dengan nilai ekspor sebesar USD 86 juta dibandingkan impor sebesar USD 69 juta. Namun, pada tahun 2018 neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit sebesar USD 6 juta, dengan nilai ekspor USD 85 juta dibandingkan impor sebesar USD 91 juta.⁸

Meskipun begitu, Maroko masih menjadi salah satu pasar ekspor non-tradisional Indonesia, dengan potensi dan peluang sebagai pintu masuk ke dalam pasar Afrika yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Oleh karenanya, melalui IAF pada tahun 2018 Indonesia menyepakati dimulainya perundingan PTA dengan tiga negara benua Afrika, yakni Mozambik, Tunisia dan Maroko guna memanfaatkan potensi dan peluang pasar ekspor serta meningkatkan volume perdagangan khususnya dengan Maroko. Menteri Perdagangan Indonesia (2016-2019), Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa dengan adanya PTA maka perdagangan antar kedua negara akan mengalami peningkatan.⁹

⁷ "Indonesia GDP per Capita", CEIC, diakses pada Februari 22, 2020, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/gdp-per-capita>

⁸ "Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang", Kementerian Perdagangan RI, diakses pada Februari 22, 2020, <http://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>

⁹ Rayful Mudassir, "KADIN: Pasar Afrika Sangat Potensial", *Bisnis.com*, diakses pada September 29, 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180415/12/784451/kadin-pasar-afrika-sangat-potensial>

Ketertarikan penulis terhadap isu penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan dilakukannya *Indonesia-Africa Forum* (IAF) pada tahun 2018 lalu. Dengan dilakukannya forum tersebut, penulis beranggapan bahwa terdapat motif untuk memperluas pasar ekspor Indonesia terhadap negara-negara pasar ekspor non-tradisional, utamanya di benua Afrika. Maroko dipilih sebagai subjek penelitian penulis, dikarenakan negara tersebut dianggap sebagai salah satu pintu masuk utama kepada pasar ekspor Afrika guna lebih meningkatkan laju ekspor Indonesia serta meningkatkan kinerja perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara. Selain itu, penulis juga memiliki ketertarikan terhadap fokus aktivitas perdagangan internasional. Oleh karenanya, studi ini merupakan studi Ilmu Hubungan Internasional, dikarenakan aktor – aktor yang terlibat merupakan aktor negara, yaitu Indonesia dan Maroko, serta menunjukkan adanya hubungan antara negara tersebut dalam hal perdagangan internasional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan Maroko.**

1.2 Identifikasi Masalah

Bagi Indonesia, pada sektor ekonomi Maroko merupakan negara mitra dagang utama di wilayah Afrika Utara yang memiliki potensi besar. Namun, Maroko masih tergolong menjadi pasar ekspor non-tradisional Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), selama ini negara-

negara utama yang mendominasi tujuan ekspor Indonesia adalah Tiongkok dengan nilai ekspor sebesar USD 27,1 miliar (15%), Jepang dengan nilai ekspor sebesar USD 19,4 miliar (10,8%), kemudian AS dengan nilai ekspor sebesar USD 18,4 miliar (10,2%), India dengan nilai ekspor sebesar USD 13,7 miliar (7,6%), serta Singapura dengan nilai ekspor sebesar USD 12,9 miliar (7,2%) pada tahun 2018 dengan komoditas ekspor terbesar yaitu sektor bahan bakar mineral utamanya Batu Bara senilai USD 14 juta.¹⁰

Sementara itu, pun Indonesia bukan merupakan negara tujuan ekspor tradisional Maroko. Berdasarkan data dari WITS Pasar Eropa menjadi pasar yang mendominasi tujuan ekspor Maroko, seperti Spanyol dengan nilai ekspor sebesar USD 6,9 miliar (23,6%), Perancis dengan nilai ekspor sebesar USD 6,3 miliar (21,7%), AS dengan nilai ekspor sebesar USD 1,3 miliar (4,7%), kemudian Italia dengan nilai ekspor sebesar USD 1,2 miliar (4,2%), serta India dengan nilai ekspor sebesar USD 1,1 miliar (3,7%) pada tahun yang sama dengan komoditas ekspor terbesar yaitu sektor mesin dan elektronik senilai USD 5,3 miliar.¹¹

Orientasi pasar Indonesia dan Maroko yang masih mengutamakan pasar ekspor tradisionalnya, membuat peningkatan kinerja perdagangan kedua negara tersebut sulit untuk dilakukan. Pasalnya, sektor perdagangan menjadi sektor kunci terciptanya integrasi ekonomi, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi Indonesia maupun Maroko. Sejak terjadinya krisis finansial Eropa pada tahun 2008, Maroko mulai menjajaki pasar Asia untuk menjalin kemitraan dagang.

¹⁰ Kementerian Perdagangan RI., Op. Cit.

¹¹ "Product Exports by Morocco to all countries 2018", WITS, diakses pada Februari 22, 2020, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MAR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP>

Hal tersebut, sejalan dengan orientasi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia yang ingin membuka potensi pasar non-tradisional di Afrika. Oleh karenanya, peluang perdagangan tersebut perlu dimanfaatkan, terutama di tengah dinamika ekonomi global dewasa ini yang sulit untuk diterka.

Selain itu, di tengah intensitas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menyebabkan ketidakpastian yang juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi domestik, maka diperlukan adanya alternatif pasar sebagai peluang baru bagi peningkatan ekspor. Upaya untuk mendapatkan lokasi serta akses menuju pasar ekspor baru potensial, menjadi perhatian dalam kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Oleh karenanya, Indonesia harus memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara non-tradisional guna mengurangi atau menghilangkan hambatan ekspor bea masuk, salah satunya melalui skema PTA.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi masalah pada rentang waktu mulai tahun 2014 sebagai tahun perbandingan data makro ekonomi kedua negara terutama terkait dengan kinerja perdagangan tahunan (YoY), hingga pada tahun 2018 sehubungan dengan dimulainya negosiasi PTA antara Indonesia dan Maroko yang masih berjalan selagi dilakukannya penelitian ini. Kemudian, aktor yang akan menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah aktor negara, yaitu Indonesia dan Maroko. Selain itu, guna memberikan analisis yang sistematis dan terfokus mengenai terbentuknya PTA Indonesia – Maroko, penelitian ini hanya

akan berfokus kepada isu perdagangan antara Indonesia dan Maroko dengan sudut pandang penelitian berdasarkan kepentingan Indonesia.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “**Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan PTA antara Indonesia dan Maroko?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terbentuknya PTA Indonesia dan Maroko. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini, utamanya adalah berupa motivasi negara dalam menjalin hubungan perdagangan bilateral melalui PTA.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan penjelasan bagi pembaca mengenai apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan kerja sama

perdagangan PTA antara Indonesia dan Maroko. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan kerja sama perdagangan bilateral dalam ilmu hubungan internasional serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain.

1.4 Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Maroko masih belum banyak. Penelitian-penelitian yang ada, banyaknya didominasi oleh literatur yang hanya membahas hubungan perdagangan antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah. Meskipun begitu, guna memberikan penulis pemahaman mengenai bagaimana PTA dapat mendukung peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Maroko, penulis menggunakan 3 literatur.

Literatur pertama yaitu penelitian dari Rina Oktaviani, Widyastutik, dan Tanti Novianti yang berjudul “*Integrasi Perdagangan dan Dinamika Ekspor Indonesia ke Timur Tengah (Studi Kasus: Turki, Tunisia, dan Maroko)*”. Menurut para peneliti tersebut, aktivitas perdagangan bilateral Indonesia hanya berpacu kepada empat mitra dagang utama atau yang disebut juga sebagai pasar tradisional, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Cina. Sementara alternatif pasar

ekspor lainnya seperti kawasan Timur Tengah tidak dimaksimalkan meskipun memiliki potensi/pejuang yang besar untuk dilakukannya penetrasi pasar ekspor.¹²

Selain itu, para peneliti tersebut juga menyatakan bahwa ekspor komoditas yang berasal dari Indonesia kepada negara-negara Timur Tengah seperti Tunisia, Turki, dan Maroko memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama dengan adanya peningkatan harga minyak di kawasan. Pula, dibuatnya FTA antara Indonesia dan Tunisia, Turki, serta Maroko akan memberikan efek pengganda terhadap sektor ekonomi makro, sektoral, regional, dan distribusi pendapatan.¹³

Hasil penelitian dalam literatur ini, menjelaskan bahwa antara Indonesia dengan Turki dan Maroko telah terjalin perdagangan yang bersifat dua arah, sementara Tunisia hanya berperan sebagai importir produk Indonesia. Meskipun begitu, secara umum peningkatan eksor terbesar dari Indonesia ke Turki, Tunisia, dan Maroko terdapat pada komoditas berupa lemak hewan/minyak sayur dan minyak lainnya walaupun adanya perbedaan dekomposisi pertumbuhan ekspor masing-masing negara.¹⁴

Dalam penelitian yang dituangkan dalam literatur pertama tersebut, fokus penelitian adalah untuk menganalisis aliran dan pola perdagangan serta menganalisis dinamika ekspor Indonesia dengan Timur Tengah berdasarkan tiga negara selektif yaitu Turki, Tunisia, dan Maroko menggunakan pengukuran kuantitatif seperti *Intra-Industry Trade* (IIT) dan *Constant Market Share* (CMS).

¹² Rina Oktaviani, Widyastutik, dan Tanti Novianti, "Integrasi Perdagangan dan Dinamika Ekspor Indonesia ke Timur Tengah (Studi Kasus: Turki, Tunisia, dan Maroko)," *Jurnal Agro Ekonomi* 26, no. 2 (2008): 167 – 189.

¹³ *Ibid.*, hlm. 169.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 188.

Berbeda dengan penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada faktor-faktor pembentukan PTA sebagai bentuk kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Maroko. Namun, literatur tersebut dapat membantu penulis dalam memahami dinamika ekspor Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Maroko yang menjadi fokus penelitian penulis.

Literatur kedua yaitu hasil penelitian dari Sudirman yang berjudul “*Potensi, Peluang, Dan Tantangan Perdagangan Antara Indonesia Dengan Negara-negara Di Kawasan Timur Tengah*”. Menurut Sudirman, strategi untuk melakukan diversifikasi pasar merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar negara-negara tertentu yang dapat meminimalkan dampak negatif dari kondisi ekonomi-politik negara lainnya yang tidak stabil. Oleh karenanya, ekspansi pasar kepada kawasan lain seperti Timur Tengah, meliputi Arab Saudi, Turki, Maroko, Tunisia, dan Afrika perlu dikembangkan oleh Indonesia karena kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup baik.¹⁵

Temuan-temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudirman tersebut yaitu adanya potensi perdagangan antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah seperti; pertama, produk-produk Indonesia yang variatif dan berbeda dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh negara-negara di Timur Tengah. Kedua, pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Tengah relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan meskipun mengalami konflik sosial yang berkepanjangan. Ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat dari hasil pertanian

¹⁵ Sudirman, “Potensi, Peluang, dan Tantangan Perdagangan antara Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan Timur Tengah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (Juni 2016): 60-80.

maupun industri. Keempat, adanya pertumbuhan modal asing di Timur Tengah pada kisaran 3 hingga 4 persen setiap tahunnya.¹⁶

Meskipun begitu, menurut Sudirman terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi Indonesia dalam melakukan diversifikasi pasar dengan kawasan Timur Tengah, seperti pertama, jarak yang panjang akan berpengaruh pada biaya distribusi yang tinggi. Kedua, tarif bea masuk yang tinggi, akan meningkatkan harga jual produk. Ketiga, iklim politik yang kurang stabil. Keempat, dibutuhkannya dukungan sektor keuangan. Dan terakhir, adanya urgensi untuk menetapkan sertifikasi halal.¹⁷

Literatur penelitian karya Sudirman berfokus kepada potensi, peluang, serta tantangan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan lingkup analisis ekonomi-politik yang bersifat umum. Berbeda dengan penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Maroko saja. Namun, literatur penelitian tersebut dapat membantu penulis memahami berbagai tantangan atau hambatan dalam melakukan diversifikasi pasar ekspor ke Timur Tengah, khususnya dalam penelitian ini yaitu Maroko.

Literatur ketiga yang digunakan oleh penulis adalah hasil penelitian karya Andi Kurniawan yang berjudul *Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah*. Dari penelitian tersebut, terdapat beberapa temuan mengenai pandangan dan kendala untuk melakukan diversifikasi ekspor terhadap

¹⁶ Ibid., hlm. 75.

¹⁷ Ibid., hlm. 76.

pasar non-tradisional di kawasan Timur Tengah, terutama dari Indonesia. Pertama, harmonisasi dan koordinasi antar sektor di Indonesia masih menjadi hambatan, utamanya terdapat perbedaan visi, misi, dan rencana aksi terkait kebijakan ekonomi luar negeri di antara kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Luar Negeri.¹⁸

Kedua, dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara-negara Timur Tengah, meskipun terdapat keinginan untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor kepada pasar non-tradisional di kawasan Timur Tengah, Indonesia masih belum memiliki cetak biru strategi diplomasi ekonomi. Kemendag dan Kemenperin cenderung berfokus kepada peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara teluk, sementara Kemenlu menginginkan adanya pendekatan komprehensif terhadap negara bukan penghasil minyak, seperti Jordania, Tunisia dan Maroko.¹⁹

Menurut Andi Kurniawan, upaya diplomasi Indonesia kepada kawasan Timur Tengah telah dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2006 yang diarahkan pada pasar non-tradisional serta potensinya di kawasan tersebut. Akan tetapi, promosi ekspor dan komunikasi potensi perdagangan antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah masih rendah sehingga ditengarai sebagai penyebab rendahnya ekspor Indonesia kepada kawasan.²⁰

¹⁸ Andi Kurniawan, "Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, no. 3 (Maret 2014): 254-271.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 263.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 268.

Berbeda dengan hasil penelitian Andi Kurniawan yang berfokus kepada diplomasi ekonomi Indonesia dengan perbandingan terhadap diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Thailand, penulis beranggapan bahwa dengan adanya PTA antara Indonesia dan Maroko maka muncul implikasi adanya upaya Indonesia untuk melakukan diversifikasi ekspor menuju pasar non-tradisional. Oleh karenanya, penulis memfokuskan penelitian kepada faktor-faktor yang menjadi latar belakang pembentukan PTA antara Indonesia dan Maroko. Meskipun begitu, literatur penelitian karya Andi Kurniawan tersebut membantu penulis dalam memberikan gambaran bentuk diplomasi ekonomi Indonesia ke kawasan Timur Tengah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam kajian ekonomi politik ilmu hubungan internasional, pembahasan mengenai integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan berorientasi terhadap pendekatan idealisme. Pendekatan idealisme tersebut, salah satunya adalah Liberalisme.

Liberalisme, dalam hal ekonomi politik internasional, berpegang pada prinsip kebebasan pasar dari intervensi yang dilakukan oleh negara. Sebaik-baiknya ekonomi, adalah ditentukan oleh aktivitas-aktivitas perdagangan bebas yang dilakukan dalam pasar oleh individu atau perusahaan. Bagi Adam Smith, setiap individu secara terus menerus akan berusaha untuk mencari tahu apa yang dapat ia hasilkan atas berapa pun modal yang ia miliki demi keuntungannya sendiri, tanpa adanya usaha negara untuk mengatur bagaimana individu tersebut harus

menggunakan modalnya. Pemikiran utama yang dalam pendekatan liberalisme, adalah kebebasan di bawah hukum.²¹

Berbeda dengan realisme yang memandang sisi buruk manusia dalam politik dan ekonomi, liberalisme memusatkan perhatiannya pada sisi baik manusia, yang damai, kooperatif, dan kompetitif dalam suatu cara yang konstruktif tanpa campuran emosi. Dalam hal ekonomi politik, liberalisme berasumsi bahwa di dalam masyarakat terdapat apa yang disebut sebagai *positive-sum game*, yang berarti setiap orang secara potensial mampu mendapatkan hasil lebih dari apa yang mereka korbakan. Liberalisme melihat campur tangan negara di dalam pasar sebagai konflik antara koersi dan kebebasan, hak individu dan otoritas, dogma autokrasi dan logika rasional. Oleh karenanya, frasa kata *laissez-faire* yang bermakna - “biarkan” pasar bertindak sendirinya - menjadi ciri utama dalam liberalisme.²²

Seperti halnya Smith yang menentang batasan-batasan yang ditetapkan oleh negara terhadap pasar internasional, David Ricardo menyatakan bahwa dengan dilakukannya perdagangan bebas maka akan menghasilkan efisiensi dalam kegiatan produksi oleh suatu bangsa, oleh karenanya efisiensi menjadi salah satu nilai yang dijunjung tinggi oleh liberalisme. Bebasnya aktivitas individu dalam kegiatan produksi, keuangan, dan struktur ilmu pengetahuan akan membentuk suatu ikatan kuat atas keuntungan bersama di antara bangsa-bangsa, sehingga menjadikan isu keamanan sebagai hal yang tidak relevan lagi.²³

²¹ David Balaam dan Michael Veseth., Op. Cit., hlm. 43.

²² Ibid., hlm. 48.

²³ Ibid., hlm. 51.

Namun, pandangan-pandangan liberalisme mengenai kebebasan absolut individu dalam pasar ditentang oleh John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa individu dan pasar cenderung membuat keputusan yang tidak bijak pada saat dihadapi dengan situasi yang tidak menentu di masa yang akan datang, oleh karenanya negara diharuskan untuk menggunakan kekuatannya guna meningkatkan kinerja pasar namun dengan batasan-batasan tertentu yang justru tidak mengekang kebebasan pasar.²⁴ Pula bagi Keynes, peran utama yang dapat dilakukan oleh negara dalam aktivitas ekonomi di dalam pasar adalah seperti mengendalikan inflasi, membentuk lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, berbeda namun serupa dengan ide-ide Smith dan Ricardo, negara memiliki peranan makro ekonomi yang penting namun dengan tetap menjunjung tinggi pembentukan pasar bebas.²⁵

Dapat disimpulkan dari asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Keynes, guna mendorong pertumbuhan ekonomi maka negara dapat melakukan perluasan pasar dengan melakukan integrasi ekonomi terhadap pasar di negara lain. Oleh karenanya, guna membantu penulis dalam membentuk fondasi dan menganalisis temuan-temuan penelitian, penulis akan menggunakan teori-teori bidang kajian integrasi ekonomi.

Menurut Balaam, integrasi ekonomi adalah proses di mana sekelompok negara-bangsa sepakat untuk mengabaikan batasan-batasan nasional demi tujuan-tujuan ekonomi, membentuk keterhubungan sistem pasar yang lebih padat dan luas.

²⁴ Ibid., hlm. 55.

²⁵ Ibid., hlm. 57.

Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh sebuah negara untuk melakukan integrasi ekonomi, yang pertama merupakan *Free Trade Area* (FTA) yang melibatkan tingkat integrasi yang relatif minimal, seperti pengurangan hambatan tarif terhadap barang dan jasa. Tahapan berikutnya dinamakan sebagai serikat kepabeanan (*customs union*), sekelompok negara sepakat terhadap pengaturan pembebasan tarif dalam perbatasan kolektif mereka dan terhadap sebuah susunan hambatan dagang eksternal. Tahapan terakhir adalah *economic union*, yang mana dalam tahap ini tidak hanya terjadi integrasi ekonomi, namun juga politik. Dalam sebuah *economic union*, hambatan non-tarif dihilangkan bersamaan dengan hambatan tarif, sehingga menghasilkan pembentukan integrasi pasar secara penuh, pula terjadinya pergerakan bebas atas barang, jasa, orang, serta permodalan.²⁶

Integrasi ekonomi sangat menonjol dikarenakan hal tersebut merupakan cara bagi sebuah negara untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya yang langka dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Balaam juga menjelaskan bahwa dalam istilah ekonomi, integrasi menghasilkan apa yang disebut sebagai pendapatan efisiensi statis dan dinamis. Dua alasan utama integrasi ekonomi menghasilkan efisiensi statis adalah pertama, dengan adanya kebebasan perdagangan, setiap negara anggota mampu melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan dalam hal efisiensi produksi. Kedua, bahwa pembentukan pasar yang terintegrasi secara

²⁶ Ibid., hlm. 233.

luas mampu menciptakan efisiensi pada industri tertentu pada saat dimungkinkan adanya produksi skala besar atau produksi jangka panjang.²⁷

Kemudian, keuntungan paling penting dari adanya integrasi ekonomi adalah dalam jangka panjang, efisiensi dinamis mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Akibat dari dihilangkannya hambatan-hambatan dagang, maka pasar akan menjadi lebih kompetitif, sehingga suatu bisnis diharuskan untuk bersaing dan berinovasi, yang kemudian akan menghasilkan efisiensi produksi. Balaam melanjutkan, bahwa apabila integrasi ekonomi terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi cenderung akan meningkat yang berujung pada peningkatan standar hidup.²⁸

Integrasi ekonomi, dapat dilakukan oleh negara-negara secara resiprokal (seperti PTA). Menurut Richard Baldwin dan Caroline Freund, negara-negara menempatkan tarif perdagangan atas tiga alasan utama. Pertama, pertimbangan ketentuan perdagangan (*terms-of-trade/TOT*) mungkin dapat mendorong negara untuk menggunakan tarif guna menurunkan harga impor relatif terhadap harga eksportnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan negaranya. Kedua, negara mungkin untuk menetapkan tarif dikarenakan adanya gejolak politik dalam negeri. Tarif dapat digunakan sebagai alat redistribusi internal, biasanya untuk mengalihkan pendapatan terhadap industri, wilayah, atau kelompok tertentu. Ketiga, negara-negara, terutama negara berkembang biasanya bergantung pada

²⁷ Ibid., hlm. 234.

²⁸ Ibid., hlm. 235.

penetapan tarif sebagai tambahan dari pendapatan perpajakan yang dibutuhkan untuk belanja pemerintah.²⁹

Oleh karenanya menurut Baldwin dan Freund, liberalisasi perdagangan resiprokal dapat menetralkan dua alasan pertama yang dijelaskan di atas. Pertama, dengan melakukan liberalisasi resiprokal, motivasi TOT dapat dinetralkan dan tingkat kesejahteraan gabungan akan lebih tinggi, dikarenakan dengan tarif yang rendah pola konsumsi hanya sedikit terdistorsi. Kedua, dengan pemotongan tarif maka pembentukan koalisi pro-liberalisasi perdagangan akan lebih mudah. Kekuatan politik akibat dari kerugian dikenakan pemotongan tarif dapat ditekan sebagai hasil dari adanya keuntungan yang didapatkan oleh eksportir atas pemotongan tarif resiprokal dari negara tujuan. Namun dalam alasan ketiga, negara mungkin kehilangan sebagian pendapatan sebagai akibat dari pemotongan tarif, tetapi dalam menjalin perjanjian perdagangan sering kali diiringi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat meminimalkan kerugian yang didapatkan. Selebihnya, dengan pembentukan perjanjian perdagangan maka hubungan resiprokal yang ada dapat membantu mengunci kepentingan pemerintah untuk melakukan proteksi. Oleh karenanya, liberalisasi resiprokal dibutuhkan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan dagang terhadap perdagangan internasional.³⁰

Guna memberikan penjelasan alur penelitian mengenai hubungan perdagangan antara Indonesia dan Maroko, maka digunakan konsep kepentingan

²⁹ Richard Baldwin dan Caroline Freund, "Preferential Trade Agreements and Multilateral Liberalization," dalam *Preferential Trade Agreement Policies for Development*, ed. Jean-Pierre Chauffour dan Jean-Cristophe Maur (Washington D.C.: World Bank, 2011), hlm. 122.

³⁰ Ibid. hlm. 122.

nasional berdasarkan pendekatan liberalisme dan konsep kepentingan ekonomi. Adam Smith mendefinisikan kepentingan nasional sebagai akumulasi dari kepentingan setiap individu, dan merupakan sebuah kondisi natural yang diproduksi tanpa adanya perencanaan atau kesadaran.³¹ Sementara itu, menurut Carr konsepsi kepentingan nasional berkisar di sekitar sebuah simbiosis kepentingan tertentu dan kepentingan komunitas, dengan menjaga sintesis antara kepentingan tertinggi sebuah komunitas dengan kepentingan tertinggi seorang individu secara natural.³² Liberalisme juga menyatakan bahwa perdagangan bebas merupakan maksud yang paling kuat untuk mencapai kekayaan nasional. Perdagangan bebas dapat memperluas jaringan kontak dan tingkat pengertian antara masyarakat dunia dan mendorong pertemanan internasional, pemikiran dan pemahaman kosmopolitan.³³

Berdasarkan perspektif liberalisme, kepentingan nasional tidak dapat di definisikan dalam istilah kedaerahan atau nasional, utamanya, kepentingan nasional harus menghasilkan adanya penghapusan batasan-batasan ekonomi nasional yang merupakan sebuah produk dari pembagian manusia ke dalam sebuah keberagaman kelompok politik.³⁴ Oleh karenanya, kepentingan nasional erat pula kaitannya dengan kepentingan ekonomi. Menurut K. M. Matusevich, kepentingan ekonomi merupakan kondisi material vital dan spiritual atas keberadaan manusia, yaitu, kesadaran akan kebutuhan ekonomi masyarakat serta merupakan sumber motivasi

³¹ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 107.

³² Ibid., hlm. 107.

³³ Ibid., hlm. 118.

³⁴ Ibid., hlm. 119.

tindakan dan reproduksi sosio-ekonomi.³⁵ Pula, menurut Babina dan Lozova kepentingan ekonomi merupakan sebuah kategori yang kompleks yang menjelaskan motif dan insentif para pelaku pasar, sebab-sebab internal dan eksternal, serta tujuan dari realisasi ekonomi.³⁶ Secara umum, kepentingan ekonomi merujuk pada elemen-elemen yang ditekankan oleh para pelaku ekonomi politik, yang mana memainkan peran penting dalam menjaga tatanan dunia.³⁷

Kerjasama perdagangan dapat dilakukan oleh negara dalam berbagai bentuk, seperti bilateral/regional maupun multilateral. Bagaimana pun bentuk kerjasama yang dilakukan, sejatinya pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang utama dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, proses penelitian kualitatif melibatkan serangkaian pertanyaan dan prosedur, data biasanya dikumpulkan dalam sebuah pengaturan partisipan, analisis data dibangun melalui tema tertentu menuju sebuah tema umum, serta sang peneliti melakukan interpretasi atas makna dari data yang diperoleh.³⁸

³⁵ Tymur Loskutov, Sergey Miroshnychenko dan Rostyslav Lemekha, "The Concept of Legitimate Economic Interest," *Baltic Journal of Economic Studies* 4, no. 5 (Mei 2018): 176, <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-175-178>.

³⁶ Ibid., hlm. 176.

³⁷ Charles Chong-Han Wu, "Understanding the Structures and Contents of National Interest: An Analysis of Structural Equation Modeling," *The Korean Journal of International Studies* 15, no. 3 (Desember 2017): 396, <http://dx.doi.org/10.14731/kjis.2017.12.15.3.391>

³⁸ John H. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2009), hlm. 12.

Penulis juga akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplanatif. Menurut Joseph A. Maxwell dan Kavita Mittapali, istilah penelitian eksplanatif mengindikasikan bahwa penelitian ditujukan untuk memberikan penjelasan, dibandingkan hanya untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang dipelajari atau diteliti, dengan mencari keterhubungan antar variabel.³⁹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui identifikasi sumber datanya, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan berupa wawancara, sementara data sekunder didapatkan melalui dokumen seperti dokumen publik, dokumen resmi negara yang dipublikasikan, berita dan siaran pers dari kementerian-kementerian yang bersangkutan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Data

Berdasarkan pemaparan mengenai sumber-sumber data di atas, penelitian ini akan menggunakan sumber penelitian berdasarkan data primer, yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam perancangan dan perundingan PTA antara Indonesia dan Maroko yakni Direktorat Jenderal

³⁹ Joseph A. Maxwell dan Kavita Mittapoli, "Explanatory Research", dalam *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Vol. 1 & 2, editor Lisa M. Given, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2008), hlm. 323-325.

Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kemudian data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik guna memberikan data-data terkait neraca perdagangan bulanan dan tahunan Indonesia (ekspor-impor) ke Maroko selama tahun 2016 hingga 2019. Digunakan pula dokumen-dokumen resmi, terutama yang bersumber dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai institusi utama pelaksana PTA antara Indonesia dan Maroko. Selain itu, data sekunder diperoleh pula buku-buku teori, kemudian jurnal-jurnal, serta berita-berita daring, dan laman daring indikator perdagangan seperti CEIC, WITS, dan lain sebagainya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang mengandung tujuh unsur utama yaitu, pertama, latar belakang masalah; kedua, identifikasi masalah (yang terdiri dari perumusan dan pembatasan masalah); ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian; keempat, kajian pustaka; kelima, kerangka pemikiran; keenam, metode penelitian dan teknik pengumpulan data; serta ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab II, akan diawali dengan melakukan pembahasan komprehensif mengenai perkembangan PTA dalam sistem perdagangan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan membahas proliferasi dan kedalaman konten PTA sejak tahun 1990-an, pembahasan mengenai popularitas PTA dalam sistem perdagangan

internasional, serta kerangka *Rules of Origin* (ROO) sebagai elemen utama dalam PTA.

Bab III akan diawali dengan membahas kinerja serta neraca perdagangan dan investasi Indonesia – Maroko dari tahun 2014 hingga pada tahun 2018 secara terperinci, dengan memberikan pemaparan produk-produk komoditas yang saling diperdagangkan oleh kedua negara berdasarkan pengelompokan produk, serta akan dibahas pula mengenai kondisi perekonomian domestik kedua negara.

Bab IV menjadi bab analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan PTA antara Indonesia dan Maroko. Analisis faktor-faktor tersebut dimulai dengan pembahasan posisi Maroko sebagai pusat perdagangan dan akses pasar di kawasan Afrika Sub-Sahara, strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia serta kesamaan ukuran ekonomi antara Indonesia dan Maroko melalui perspektif teori dan konsep.

Bab V akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.

1.8. Linimasa**Tabel 1.1 Linimasa Penelitian Skripsi**

Ket	Februari	September	Oktober	November	Desember	Januari
Bab I						
Bab II						
Bab III						
Bab IV						
Bab V						